

**PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

Oleh:

YUN SYURIKAL AHDA TAMPUBOLON

NIM. 51.14.3.152

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

**PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Akuntansi Syariah pada Program Akuntansi Syariah*

OLEH:

YUN SYURIKAL AHDA TAMPUBOLON

NIM. 51.14.3.152

**Program Studi
Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M/1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YUN SYURIKAL AHDA TAMPUBOLON**

NIM : 51143152

Tempat dan Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 25 Januari 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 381

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



Yun Syurikal Ahda Tampubolon

Skripsi berjudul **“PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”** an. Yun Syurikal Ahda Tampubolon, NIM. 51143152 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 21 Agustus 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M. Nawawi, M.A
NIP. 19760818 200710 1 001

Rahmi Syahriza, MA
NIP. 19850103 201101 2 011

Anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendra Harmain, M.Pd
NIP.197305101998031003

Laylan Syafina, M.Si
NIP. 1991082672018012002

Penguji I

Penguji II

Drs.Mhd. Syahman Sitompul, S.E,Ak.,M.Si
NIP. 19530710 197712 1 001

Rahmi Syahriza, MA
NIP. 19850103 201101 2 011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Andri Soemitra, M.Ag
NIP. 19760507 200604 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Oleh:

**YUN SYURIKAL AHDA TAMPUBOLON
NIM. 51143152**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing I

**Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003**

Medan, Agustus 2018

Pembimbing II

**Laylan Syafina, M. Si
NIP. 1991082672018012002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**Hendra Harmain, M. Pd
NIP.197305101998031003**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan dan hadiahkan kepada Mahkota Alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

Skripsi ini adalah suatu karya yang penulis selesaikan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tersayang, khususnya untuk keluarga terkasih yang menjadi alasan terkuat penulis untuk selalu semangat dan pantang menyerah.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, almarhumah kakak saya Nurul Haryati Tampubolon yang sampai dengan nafas terakhir masih selalu memberikan dukungan dalam segala hal serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

4. Bapak Hendra Hermain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi 1 yang telah sabar dalam membimbing saya dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Laylan Syafina M.Si selaku Pembimbing Skripsi 2 yang telah sabar dalam membimbing saya dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Kamilah M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahan kepada saya untuk selalu sabar dalam menghadapi segala hal.
7. Ibu Dr. Nurlaila Harahap, MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam setiap kesempatan.
8. Staf pegawai Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya selama masa perkuliahan.
9. Para pegawai KPP Pratama Medan Timur yang telah memberikan bantuan data dan keterangan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat AKS A yang selalu bersama dalam suka dan duka selama 4 tahun ini dan memberikan begitu banyak kesan yang mendalam bagi saya.
11. Sahabat Sengklek Rizky Dwi Lestari, Niki Afsari Putri, Wamro Addina, Cindy Nur Annisa, dan Lisa Desriyanti yang selalu bersama sejak SMA yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini, dan telah menghiburku dikala sedih melanda.
12. Sahabat Shalihah Sri Deva Riska, Santy Fatimah, dan Siti Nurhasanah yang telah menemani keseharianku selama 4 tahun ini dalam susah dan senang dan selalu memberi semangat saat keterpurukanku.
13. Teman seperjuangan di Kos Para Jomblo Rizky, Cindy, Santy, dan Kiki yang telah memberikan gangguan selama pengerjaan skripsi, namun membuatku semangat selama mengerjakan skripsi.

14. Sahabat Rizky Winda Sari dan Siti Fatimah yang selalu menghibur dengan kegilaan setiap saat yang saya temukan sewaktu KKN dan berteman hingga sekarang seperti saudara.
15. Teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Agustus 2018

Penulis,

Yun Syurikal A.TPB.
NIM. 51.14.3.152

ABSTRAK

Yun Syurikal Ahda Tampubolon (2018). **“Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”** di bawah bimbingan Pembimbing I Bapak Hendra Hermain, S.E.,M.Pd dan Pembimbing II Ibu Laylan Syafina, M.Si.

Sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan, salah satu caranya adalah dengan adanya pemeriksaan pajak (*tax audit*). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan *software* SPSS versi 20. Objek penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak sebesar 3,700 > dari t_{tabel} sebesar 2,00172 dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Kata kunci: *Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Self Assessment System, dan Surat Pemberitahuan (SPT).*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Pemahaman Perpajakan	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	10
c. Sistem Perpajakan	11
d. Pengelompokan Perpajakan	12
e. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	13
f. Timbulnya Utang Pajak	14
g. Istilah Perpajakan	15
h. Pajak menurut Pandangan Islam	16
2. Pemahaman tentang Pemeriksaan Pajak	20
a. Pengertian dan Kriteria Pemeriksaan Pajak	20
b. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak	23
c. Ruang Lingkup dan Pedoman Pemeriksaan Pajak	24
d. Pedoman Pemeriksaan Pajak	25
e. Norma Pemeriksaan Pajak	26
f. Laporan Pemeriksaan Pajak	28
3. Pengertian Wajib Pajak dan Wajib Pajak Badan	29
4. Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	30
5. Pengertian, Jenis, dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	31
B. Penelitian Sebelumnya	33
C. Kerangka Teoritis	34

D. Perumusan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	38
D. Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Definisi Operasional.....	39
G. Teknik Analisa Data.....	40
1. Analisis Statistik Deskriptif	40
2. Uji Asumsi Klasik	40
3. Analisis Regresi Sederhana.....	43
4. Pengujian Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	45
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur	45
2. Struktur Organisasi.....	47
B. Hasil Penelitian	49
1. Statistik Deskriptif Variabel.....	51
2. Uji Asumsi Klasik	52
3. Persamaan Regresi Linear Sederhana	59
4. Pengujian Hipotesis.....	60
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	60
b. Koefisien Determinasi.....	61
5. Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur.....	5
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1	Pegawai KPP Pratama Medan Timur.....	46
Tabel 4.2	Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan	50
Tabel 4.3	Analisis Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.4	Uji Normalitas KS-Z	53
Tabel 4.5	Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF	55
Tabel 4.6	Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Park.....	57
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4.8	Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson	58
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	59
Tabel 4.10	Hasil Uji t.....	60
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur.....	47
Gambar 4.2	Uji Normalitas dengan Normal P-Plot.....	54
Gambar 4.3	Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki wilayah luas dengan kepadatan penduduk yang beragam suku, ras, dan agama. Dengan wilayah yang luas tersebut, sudah seharusnya pemerintah berupaya ekstra keras dalam hal pembangunan di segala bidang. Untuk mencapai hal tersebut, membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu, pemerintah memberlakukan pemungutan pajak. Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.¹

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Sekitar 70% APBN Negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.²

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Eva adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan

¹ Ricky Billy dan Inggriani Elim, "Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak", Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015, h. 797

² Tryana A.M. Tiraada, "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP", Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, h. 999

masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua Wajib Pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.³

Sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak juga harus diimbangi dengan pengawasan yang besar pula agar tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.⁴

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Karena, jika Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap hal tersebut akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.⁵

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham akan hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak

³ Eva Meilina, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKOM, 2014), h. 1.

⁴ Nurlinda Batubara, " Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan" (Skripsi, Fakultas Ekonomi UMSU Medan, 2015), h. 1

⁵ *Ibid*

perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan, salah satu caranya dengan adanya hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyelidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*).⁶

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi, dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain.⁷ Tujuan lain tersebut adalah pemeriksaan dalam pemberian NPWP, pemeriksaan dalam rangka keberatan, pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan, pemeriksaan guna pencocokan data atau alat keterangan. Pada umumnya, kendala yang dihadapi oleh *tax authorities* dari Negara-negara berkembang adalah ketersediaan data dan informasi sehingga pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak telah menjalankan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itulah yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas Negara.

Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT tahunan kepada Wajib Pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau

⁶ Meilina, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak", h. 3

⁷ Sophar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 380-381

terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.⁸

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak harus dapat memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dapat mencegah terjadinya penghindaran dan/atau pelaporan kewajiban yang tidak semestinya oleh Wajib Pajak.⁹

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.¹⁰

Namun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak umumnya masih rendah tidak sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong Wajib Pajak agar lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan

⁸ Arifanda Purba, "Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008-2011 untuk menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan yang Potensial" (Tesis, Program Magister UI, 2012), h.2

⁹ *Ibid*

¹⁰ Meilina, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak", h. 4

perpajakan yang berlaku, sehingga pengaruh selanjutnya akan meningkatkan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak.

Begitu juga hal yang terjadi di KPP Pratama Medan Timur yang pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang melapor. Berikut ini data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang dapat memperlihatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tabel 1.1

Data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	SPT Tahunan Lapor	SPT Tahunan Tidak Lapor	Persentase Tidak Lapor
2013	4.954	2.507	2.447	49%
2014	6.464	2.529	3.935	61%
2015	7.336	2.610	4.726	64%
2016	8.296	2.588	5.708	69%
2017	9.714	2.183	7.531	78%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dapat dilihat dari pengolahan data di atas bahwa dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Persentase tidak lapor juga menunjukkan kenaikan dari tahun 2013 sebesar 49% dan semakin mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2017 sebesar 78%. Faktor yang mempengaruhinya karena kepatuhan Wajib Pajak Badan yang masih kurang dalam melaporkan dan membayar sendiri pajaknya sesuai dengan prinsip *self assessment system*.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dan Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengambil judul **“PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rendahnya kewajiban membayar pajak ditunjukkan dengan masih banyaknya Wajib Pajak Badan yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara.
2. Menurunnya kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melapor SPT Tahunan dari tahun ke tahun walaupun dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Medan Timur.

C. Batasan Masalah

Penelitian terbatas pada pengaruh pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan selama periode 2013-2017. Selain itu pengaruh

¹¹ Nurlinda, “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak”, h. 3-4

pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dimaksud hanya dipandang sebagai kondisi dan bukan sebagai suatu prosedur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah ada pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur tahun 2013 – 2017?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur tahun 2013 - 2017.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis untuk memahami dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2) Bagi Aparat Pajak

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Medan Timur khususnya dalam penentuan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3) Bagi Kepentingan Akademis

Dapat menambah kepustakaan terhadap perkembangan ilmu ekonomi terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemahaman Perpajakan

a. Pengetian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:

1) Rochmat Soemitro mengatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹²

2) Menurut S.I Djajadiningrat:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

3) Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³

¹² Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h.1

¹³ Ziski Azis, *et. al.*, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu kontribusi wajib, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari pemerintah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi *Budgeter* atau fungsi *Financial*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2) Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- a) Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
- b) Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

- c) Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- d) Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

3) Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

- a) Berdasarkan sektor; dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.
- b) Berdasarkan wilayah; dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

4) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.¹⁴

c. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu Negara terdiri dari tiga unsur yaitu, *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh

¹⁴ *Ibid*, h.2-3

wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang.
- 2) *Semi Self Assessment System*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- 3) *Self Assessment System*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- 4) *Withholding System*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.¹⁵

d. Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

¹⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.4

Menurut lembaga pemungutnya:

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.¹⁶

e. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif; dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif; dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat

¹⁶ Prabowo, *Akuntansi Perpajakan*, h. 6-7

harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.¹⁷

f. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran pemajakan, (*tatbestand*) yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan. Ada dua hal ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

1) Ajaran Formil

Teori formil merupakan kebalikan dari teori materil. Menurut teori ini, timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah dipenuhi *tatbestand*, tetapi Pejabat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak. Dalam teori formil, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, diantaranya:

- a) Menimbulkan utang pajak
- b) Dasar penagihan pajak
- c) Menentukan jumlah pajak yang terutang

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 3-4

Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi. Kelemahan teori ini yaitu besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teori formil ini tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Teori ini hanya diterapkan pada saat timbulnya utang Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Ajaran Materil

Menurut teori ini, utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat *tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu, sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak. Berdasarkan teori ini, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, diantaranya:

- a) Dasar penagihan pajak
- b) Menentukan jumlah utang pajak.¹⁸

g. Istilah Perpajakan

- 1) Wajib pajak; adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Badan; adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

¹⁸ Ziski Azis, "Perpajakan", h. 8-9

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk usaha tetap.

- 3) Pengusaha; adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- 4) Pengusaha Kena Pajak; adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak; adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 6) Surat Pemberitahuan (SPT); adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Surat Pemberitahuan Masa; adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 8) Surat Pemberitahuan Tahunan; adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.¹⁹

h. Pajak menurut Pandangan Islam

Dari 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, tidak satu pun terdapat kata "pajak", karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab. Namun, sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada

¹⁹ *Ibid*, h. 13-14

kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar*”. (QS. Al-Hujuraat: 15)²⁰

Berdasarkan ayat di atas, bahwasanya berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin pada jalan Allah, dimana berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits. Ibnu Taimiyah mendukung kuat diterapkannya *dharibah* atau pajak tambahan selain zakat. Alasan diterapkannya zakat adalah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas maksimum. Sementara alasan penetapan pajak tambahan bukan sekedar penguasaan kekayaan di atas batas maksimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu untuk membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat. Termasuk berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, seperti perlindungan dari segi keamanan, ekonomi, dan fasilitas lain yang tentunya membutuhkan biaya untuk merealisasikannya, sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Kewajiban tersebut hanya bisa direalisasikan dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan mengungkapkan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh

²⁰ Al-Qur'an dan terjemahan

Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.²¹

1) Definisi pajak menurut syariah

- a) Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.
- b) Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.²²

2) Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh

- a) Abu Yusuf dalam kitabnya menyebutkan bahwa:
Semua Khulafaurayidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- b) M. Umar Chapra dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan bahwa hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah

²¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.28

²² *Ibid*, h.31

mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal Negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hal ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”.²³

3) Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram

Dr. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam* menyatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu sudah dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan: “Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. Maka dari itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Islam, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi kondisi (syarat):

²³ *Ibid*, h.156-157

- 1). Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- 2). Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.²⁴

2. Pemahaman tentang Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian dan Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak (*tax audit*) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 9 tahun 1994 Pasal 1 huruf s).²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁶

Menurut ketentuan tersebut, yang berhak mengadakan pemeriksaan perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Karena itu, pada prinsipnya, pemeriksaan pajak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak.

Tujuan pemeriksaan, ruang lingkup, dan sifat pemeriksaan pajak sangat berlainan dari pemeriksaan pajak akuntan publik. Tujuan pemeriksaan yaitu:

²⁴ *Ibid*, h.159-161

²⁵ Sophar Lumbantoruan, "Akuntansi Pajak", h. 380-381

²⁶ Nurlinda, "Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak", h. 7

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.
 - b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - d) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf b tidak dipenuhi.
- 2) Tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Pemberian NPWP atau pencabutan NPWP.
 - b) Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP.
 - c) Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru.
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan.
 - f) Pencocokan data/atau alat keterangan.
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu.
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Petambahan Nilai dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - i) Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain di atas.²⁷

Seperti akuntan publik dalam tugasnya, petugas pemeriksa pajak pun melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan. Bilamana pembukuan, catatan,

²⁷ Sophar Lumbantoruan, "Akuntansi Pajak", h. 381-382

dan dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan Undang-Undang petugas pemeriksa berwenang memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaannya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut.²⁸

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013, kriteria pemeriksaan adalah:

- 1) Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan rutin dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Wajib pajak orang pribadi atau Badan menyampaikan:
 1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar
 2. SPT Tahunan Pph yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar
 3. SPT Tahunan Pph untuk bagian tahun pajak sebagai akibat perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambil alihan usaha atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - c) Wajib pajak orang pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - d) Wajib pajak orang pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas

²⁸ *Ibid*

kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- 2) Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis resiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000.
 - c) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
 - d) Permintaan Wajib Pajak.
 - e) Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
 - f) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan, atau laporan pemeriksaan pajak.²⁹

b. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

- 1) Pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2009.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

²⁹ Nurlinda, "Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak", h. 10-12

- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015.
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2016, tanggal 26 Februari 2015³⁰

c. Ruang Lingkup dan Pedoman Pemeriksaan Pajak

Untuk melaksanakan pemeriksaan ini ada dua ruang lingkup pemeriksaan yaitu:

- 1) Pemeriksaan lengkap yang dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- 2) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan:
 - a) Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
 - b) Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pada pemeriksaan kantor, ada dua cara pemeriksaan yaitu penelaahan berkas-berkas dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu memanggil Wajib

³⁰ Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), h. 141

Pajak yang bersangkutan, atau Wajib Pajak diminta datang dengan membawa berkas-berkasnya.³¹

d. Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pedoman pemeriksaan pajak yang digariskan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan berulang-ulang untuk tahun yang sama. Berarti pemeriksaan pajak sekarang ini bersifat *all tax system* (sekali pemeriksaan menyangkut semua jenis pajak). Ini dimaksudkan untuk menghindarkan agar perusahaan Wajib Pajak di dalam melakukan pekerjaannya tidak terganggu.
- 2) Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan ulang, kecuali jika terungkap data baru yang menunjukkan adanya indikasi penggelapan pajak. Itu pun hanya dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal Pajak.
- 3) Pemeriksa harus menjalankan maksud dan tujuan pemeriksaan dan menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksaan serta Surat Perintah Pemeriksaan. Petugas pemeriksa pajak harus menjelaskan mengapa perusahaan Wajib Pajak harus diperiksa dan sebagainya. Apabila petugas pemeriksa pajak meminjam buku maka hanya buku atau buku-buku yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang boleh dipinjam.
- 4) Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya. Artinya, jangan terlalu lama memakan waktu sehingga mengganggu konsentrasi Wajib Pajak untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya.
- 5) Petugas pemeriksa pajak harus memberitahukan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan.³²

³¹ Sophar Lumbantoruan, "Akuntansi Pajak", h. 383-384

³² *Ibid*, h. 385-386

e. Norma Pemeriksaan Pajak

1) Pemeriksa Pajak di Lapangan

- a) Pemeriksa pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan.
- b) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- c) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- d) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak.
- e) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
- f) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan.
- h) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.³³

³³ *Ibid*, h.387-388

2) Pemeriksa Pajak di Kantor

- a) Pemeriksa pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
- b) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- c) Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.
- d) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.
- e) Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan.³⁴

3) Pelaksanaan Pemeriksaan

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan oleh seorang pemeriksa atau lebih.
- b) Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa Pajak, di kantor wajib pajak, atau di kantor lainnya, atau di tempat usaha maupun di tempat tinggal atau tempat lain yang dianggap ada

³⁴ *Ibid*, h. 388-389

kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- c) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu.
- d) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
- e) Hasil Pemeriksaan Laporan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. terhadap temuan dalam Pemeriksaan Lengkap atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- f) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.³⁵

f. Laporan Pemeriksaan Pajak

Setiap pemeriksaan selalu diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pajak, pembuatan laporan pemeriksaan itu menjadi keharusan. Laporan ini akan mencerminkan watak dan profesionalisme pemeriksa. Selain itu, dalam laporan ini akan diketahui kekurangan yang ditemukan oleh pemeriksa dalam pembukuan atau diri Wajib Pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan, pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi

³⁵ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.65

lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan:
 - a) Berbagai faktor perbandingan.
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan.
 - c) Sifat dari penyimpangan.
 - d) Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.
 - e) Pengaruh penyimpangan.
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
- 3) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.³⁶

3. Pengertian Wajib Pajak dan Wajib Pajak Badan

Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak.

Pengertian Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk usaha tetap yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ *Ibid*, h.392-393

4. Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK 03/2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁷

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 11 adalah:

- 1) Bagi wajib pajak penghasilan
 - a) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b) Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
 - c) Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak
 - a) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
 - b) Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - c) Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

³⁷ Burhanuddin, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Halu Oleo Kendari, 2017), h.12

3) Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut, serta disetorkannya.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Zain dalam bukunya pada tahun 2003, kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.³⁸

b. Jenis dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

³⁸ *Ibid*, h.25

- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pajak sebelum batas waktu berakhir.³⁹

Menurut Erly Suandy dalam Nurlinda, ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- 1) Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan.
- 2) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
- 3) Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

³⁹ *Ibid*, h.26

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak sebesar 5%.

- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.⁴⁰

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Dwi Rahayu pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang”. Adapun hasil penelitian ini adalah pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan Pph Pasal 25, Pph Pasal 21, dan kewajiban material Wajib Pajak. Perbedaan penelitian Dwi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan orang pribadi yang telah selesai dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di KPP Semarang Selatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 serta teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling*, sementara penelitian ini mengambil populasi berpusat hanya pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2013 -2017 dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Selain itu, variabel dependen penelitian Dwi merupakan kepatuhan Wajib Pajak dengan berfokus pada Pph Pasal 21, Pph Pasal 25, dan kepatuhan material pengisian SPT. Sedangkan variabel dependen penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan tolak ukur persentase Wajib Pajak Badan yang melapor.
2. Penelitian Rahma Yeni pada tahun 2013 Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan

⁴⁰ Nurlinda, *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak*, h.29

Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak”. Penelitian Rahma menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, namun pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Rahma adalah Rahma menggunakan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi yang menghubungkan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak, sedangkan dalam penelitian ini pemeriksaan pajak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3. Penelitian Nurlinda Batubara pada tahun 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian Nurlinda menghasilkan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan semakin baik. Perbedaan penelitian Nurlinda dengan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Nurlinda adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sampel yang diambil adalah pegawai pajak seksi pemeriksaan dan fungsional pemeriksaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan sampel yang diambil adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

C. Kerangka Teoritis

Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

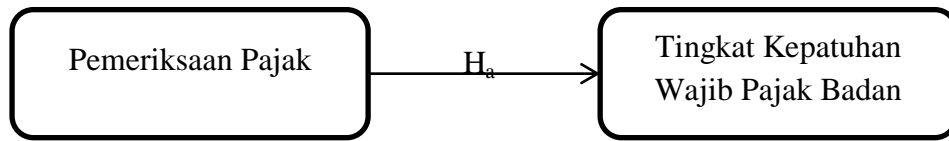
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai).

1. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan terjadinya kecurangan pajak. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit tertentu. Hubungan antara pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diungkapkan dalam Undang-Undang KUP Pasal 29 ayat (1) Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peranan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak Badan, karena pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang besar dalam meminimalisir tingkat *tax evasion* sehingga Wajib Pajak Badan itu sendiri akan berusaha untuk patuh.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis:

Ha: Terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berlokasi di Gedung KANWIL DJP SUMUT I LT. IV Jl. Sukamulia No. 17 A Medan.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Apr 2018				Mei 2018				Jun 2018				Jul 2018				Agst 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prasurvei: Persiapan judul skripsi																				
	Persiapan teori pendukung judul skripsi																				
	Pengajuan Judul Skripsi																				
	Cari Perusahaan																				
2	Proses Usulan (UP) Penelitian: Penulisan UP																				
	Bimbingan UP																				
	Seminar UP																				
	Revisi UP																				
	Pengumpulan Data																				
4	Pengolahan dan Analisis Data																				
5	Bimbingan dan Sidang																				

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.⁴¹. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur di Lingkungan Wilayah DJP Sumut I pada periode 2013 – 2017. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan selama tahun 2013 – 2017. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dipilih berdasarkan topik penelitian dan tujuan penelitian.

D. Data Penelitian

Data penelitian yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumentasi, catatan-catatan, historis, atau laporan yang ada di tempat penelitian, dalam hal ini dari seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Timur. Data yang diambil dari seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Timur yaitu:

1. Data jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur tahun 2013 – 2017.
2. Data jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Badan yang melapor tahun 2013 – 2017.
3. Data jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Badan yang tidak melapor tahun 2013 – 2017.
4. Data Wajib Pajak Badan yang diperiksa tahun 2013 – 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian

⁴¹ Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h.161

dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Atau dengan kata lain studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan suatu variabel-variabel ke dalam indikator yang lebih terperinci, sehingga variabel tersebut dapat diketahui ukurannya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan penulis adalah:

1. Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan dan untuk memperoleh keterangan dari Wajib Pajak Badan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dilihat dari jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi, dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain. Realisasi pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar Surat Perintah Pemeriksaan (SKP).
2. Kepatuhan wajib pajak badan adalah suatu tindakan ketaatan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak Badan diukur dari jumlah pelaporan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak Badan yang dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan dikalikan dengan 100%. Hasil dari pembagian dan perkalian tersebut akan menghasilkan data persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dalam hal ini, pengukuran jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan diambil dari tahun 2013 – 2017.

G. Teknik Analisa Data

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (*mean*) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam sampel berulang) variabel yang menjelaskan. Dikatakan nilai rata-rata populasi karena hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen tidak pasti. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam menganalisis data penelitian digunakan *software* SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 20. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik, perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal atau grafik. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antar variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas.⁴²

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak tidak signifikan memengaruhi variabel terikat.
- 2) Menganalisis korelasi di antara variabel bebas. Jika di antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0,90), hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai VIF. Jika $VIF < 10$, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.⁴³
- 4) Nilai *Eigenvalue* sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.

⁴² Duwi Priyanto, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h.61

⁴³ Haryadi Sarjono dan Wanda Julianita, *SPSS VS LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.70

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplots antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dari sumbu X residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Dasar analisis heteroskedastisitas yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui Uji Durbin-Waston (DW Test). Menurut Singgih Santoso, kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

- 1). Nilai D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
- 2). Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3). Nilai D-W di atas 2, berarti ada autokorelasi negatif.

3. Analisis Regresi Sederhana

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Persamaan linear sederhana dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{TKWPB} = a + b \text{ PP} + e$$

Dimana:

TKWPB = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a = Bilangan konstanta

b = Koefisien Regresi

PP = Pemeriksaan Pajak

e = Variabel lain yang tidak diteliti / *Error Term*

4. Pengujian Hipotesis

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H_a diterima). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_a ditolak.

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (Pemeriksaan Pajak) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Badan). Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung ditentukan dengan tidak memperhatikan nilai positif atau negatif dari nilai t hitung tersebut, karena nilai t hitung merupakan nilai mutlak $|t|$. Nilai t hitung yang positif atau negatif merupakan arah dari pengaruh variabel independen tersebut baik itu berbanding lurus (positif) ataupun berbanding terbalik atau berlawanan (negatif) terhadap nilai variabel terikat. Dan untuk menentukan nilai t tabel yaitu dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n - k)$ dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

Bila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ berarti variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tak bebas. Bila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka formulasi hipotesis alternatifnya yaitu sebagai berikut:

$H_0: b_i = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

$H_a: b_i \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Keuangan, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematangsiantar

Di tahun 1978, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berjumlah 100 orang yang terdiri dari pegawai sebanyak 89 orang pegawai struktural dan 11 orang pegawai fungsional.

Adapun perincian jumlah pegawai adalah sebagai berikut:

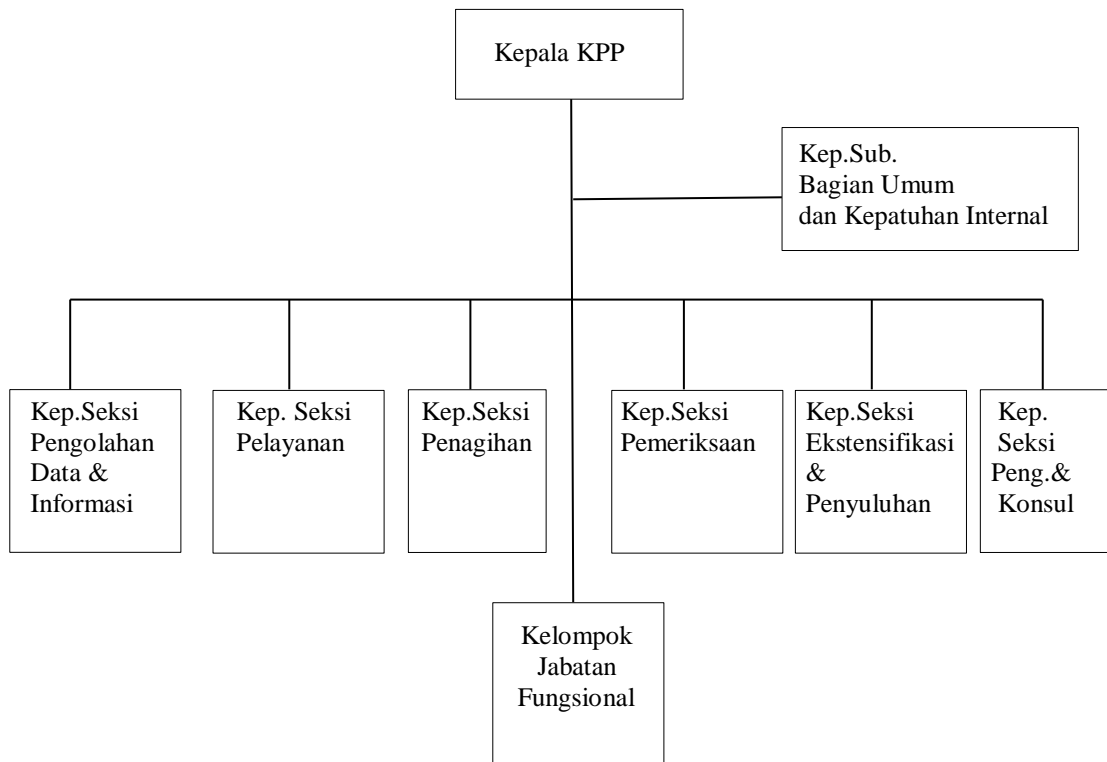
Tabel 4.1
Pegawai KPP Pratama Medan Timur

No.	Seksi/Bagian	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1
2.	Sub Bagian Umum dan Ketaatan Internal	8
3.	Pelayanan	16
4.	Pengolahan Data dan Informasi	8
5.	Eksensifikasi Perpajakan	5
6.	Pengawasan dan Konsultasi I	6
7.	Pengawasan dan Konsultasi II	12
8.	Pengawasan dan Konsultasi III	11
9.	Pengawasan dan Konsultasi IV	12
10.	Penagihan	6
11.	Pemeriksaan	5
12.	Fungsional Pemeriksaan Pajak	12
	Total	102

Sumber data: SIKKA DJP per 20 November 2017

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur yaitu:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

Deskripsi tugas KPP Pratama Medan Timur

- Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatann potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis regresi dalam mengolah data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data pemeriksaan pajak diperoleh dari akumulasi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dan data kepatuhan wajib pajak Badan diperoleh dari jumlah pelaporan SPT Badan dibagi dengan jumlah wajib pajak Badan terdaftar dikalikan 100%, sehingga menghasilkan data tingkat kepatuhan wajib pajak Badan yang terdapat pada bagian lampiran penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Thn	Bln	Jumlah Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (%)	Thn	Bln	Jumlah Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (%)
2013	Jan	34	49.88	2015	Jul	38	28.59
	Feb	30	49.76		Agst	40	28.29
	Mar	34	49.39		Sept	37	27.05
	Apr	38	49.76		Okt	45	44.34
	Mei	39	50.12		Nov	44	43.95
	Jun	38	49.39		Des	45	43.25
	Jul	31	46.1	2016	Jan	35	34.3
	Agst	32	45.39		Feb	34	34.39
	Sept	31	45.63		Mar	37	34.01
	Okt	34	59.25		Apr	34	28.16
	Nov	33	55.95		Mei	36	28.22
	Des	36	53.92		Jun	33	27.76
2014	Jan	37	41.57		Jul	35	31.31
	Feb	36	38.96		Agst	35	31.75
	Mar	37	36.68		Sept	34	30.92
	Apr	34	41.67		Okt	34	31.17
	Mei	36	39.25		Nov	30	31.65
	Jun	36	36.89		Des	38	30.68
	Jul	38	42.08	2017	Jan	37	23.06
	Agst	38	41.67		Feb	36	22.47
	Sept	39	40.36		Mar	37	21.85
	Okt	31	37.24		Apr	36	25.5
	Nov	33	36.62		Mei	36	25.82
	Des	28	37.01		Jun	36	24.1
2015	Jan	34	35.95		Jul	30	25.71
	Feb	36	35.46		Agst	36	25.93
	Mar	38	35.41		Sept	39	26.51
	Apr	33	34.97		Okt	34	16.52
	Mei	35	35.03		Nov	32	16.54
	Jun	35	34.58		Des	31	15.71

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak Badan mengalami penurunan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak badan berada di antara 45,39% - 59,25%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan dimana tingkat

kepatuhan wajib pajak Badan berada pada tingkat 36,62% - 42,08%. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak Badan berada di antara 27,05% - 35,95%. Begitu pula yang terjadi di tahun 2016 dengan tingkat 27,76% - 34,39%. Dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berada di antara 15,71% - 26,51%.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2013, pemeriksaan pajak yang dilakukan sebanyak 30 – 39 kali per bulan. Kemudian di tahun 2014 pemeriksaan pajak dilakukan sebanyak 28 – 39 kali per bulan. Kemudian mengalami peningkatan jumlah pemeriksaan pajak sebanyak 33 – 45 kali per bulan pada tahun 2016. Namun, terjadi penurunan di tahun 2016 dimana dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 – 38 kali per bulan. Dan meningkat sedikit sebanyak 30 – 39 kali di tahun 2017 pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

1. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menginterpretasikan hasil statistik deskriptif dari pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak Badan dapat dilihat dari tabel 4.3.

Tabel 4.3
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics											
	N	Range	Min	Max	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Pemeriksaan_Pajak	60	17	28	45	35.47	.435	3.372	.585	.309	1.325	.608
SPT_Badan	60	142	128	270	206.78	3.504	27.142	-.559	.309	2.135	.608
Valid N (listwise)	60										

Sumber: Data Diolah, (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa N atau jumlah pada setiap variabel adalah 60 yang berasal dari jumlah pemeriksaan pajak dan SPT Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur periode Januari 2013 – Desember 2017. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 45 dan nilai minimum sebesar 28. Nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*-nya, hal tersebut menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari pemeriksaan pajak terendah dan tertinggi.

Variabel kepatuhan wajib pajak Badan yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Badan melapor memiliki nilai maksimum sebesar 270 dan minimum sebesar 128. Standar deviasi lebih kecil dari *mean*-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari kepatuhan wajib pajak badan terendah dengan tertinggi.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model regresi yang tidak bias dan yang terbaik, maka harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Berkaitan dengan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak bias, apabila memenuhi beberapa asumsi klasik, beberapa asumsi yang dipakai dalam penelitian ini yang akan diuji yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi dan variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.⁴⁴ Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, dimana jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selain itu, untuk menguji normalitas ini dapat pula

⁴⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.181

diketahui dari tampilan *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4, Gambar 4.2 dan Gambar 4.3.

Tabel 4.4
Uji Normalitas KS-Z

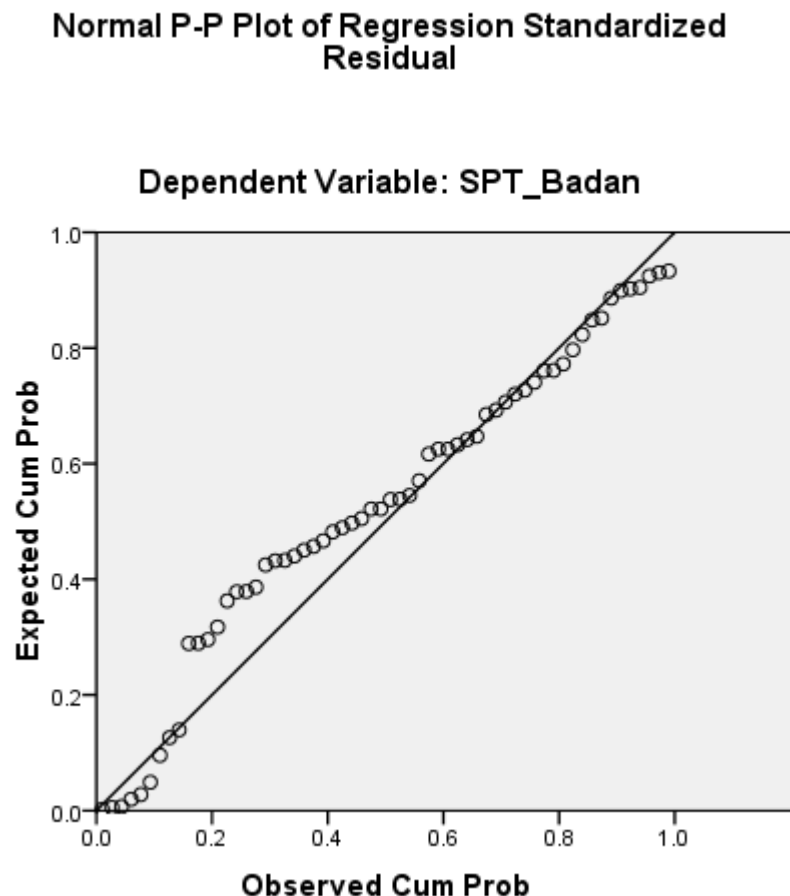
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99148921
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.065
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		1.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.162

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah, (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 yaitu 0,162 yang mengartikan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Gambar 4.2
Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot

Pada grafik *normal probability* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan

nilai Tolerance dan VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	82.026	33.864		2.422	.019		
	Pemeriksaan_Pajak	3.518	.951	.437	3.700	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: SPT_Badan

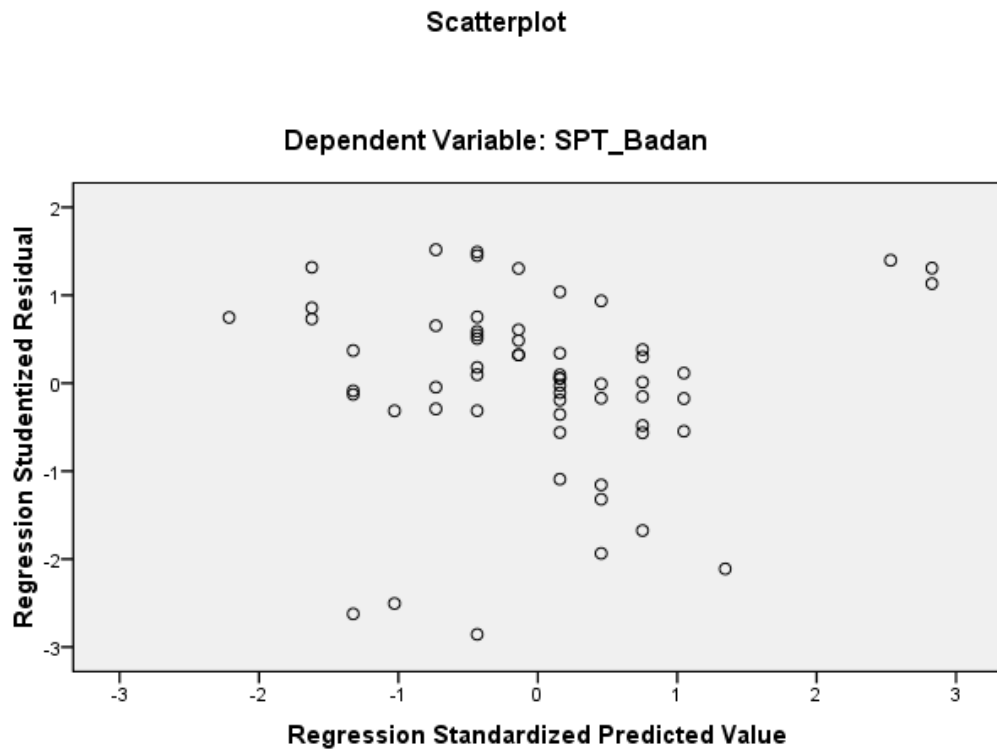
Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Dari tabel *Coefficients* dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui *scatter plot* (diagram pancar) dan metode Park, dari variabel bebas terhadap variabel terikat terpenuhi jika diantara nilai residual dan nilai

prediksinya tidak membentuk pola tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot

Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat Scatter Plot yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (*Regression Standardized Residual*) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dari Gambar 4.6 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dalam pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Park. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Park

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.108	13.003		.624
	Ln_Pemeriksaan_Pajak	-.995	3.647	-.036	-.273
					.535
					.786

Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Gejala Heteroskedastisitas ditunjukkan oleh koefisien regresi Ln masing-masing variabel bebas terhadap gejala Ln residual kuadrat LnU2. Jika nilai probabilitinya lebih besar dari nilai alphanya (atau $\text{Sig} > \alpha$) maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau $t \text{ hitung} < \text{tabel}$. Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena Sig. Variabel LnP_Pemeriksaan Pajak terhadap U2 sebesar 0,786 dimana lebih besar dari 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data pada variabel-variabel penelitian. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data waktu. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.907	.906	20.37597	1.791

a. Predictors: X1

Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,791. Angka tersebut berada di antara -2 sampai 2 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga layak untuk dilakukan pengujian regresi. Selain itu, dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dari hasil regresi dengan nilai Durbin-Watson tabel. Dengan taraf signifikansi 0,05 dan menentukan nilai dL dan dU dimana $n=60$ dan $k=1$. Di dapat $dL = 1,5485$ dan $dU = 1,6162$. Jadi, dapat dihitung nilai $4 - dU = 2,3838$ dan $4 - dL = 2,4515$.

Tabel 4.8
Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

No.	DW	Kesimpulan
1	$< dL$	Ada Autokorelasi (+)
2	$dL \leq dU$	Tanpa Kesimpulan
3	$dU < 4 - dU$	Tidak Ada Autokorelasi
4	$4 - dU \leq 4 - dL$	Tanpa Kesimpulan
5	$> 4 - dL$	Ada Autokorelasi (-)

Dapat diketahui bahwa Durbin-Watson sebesar 1,791 terletak pada daerah $dU \leq 4 - dU$ ($1,6162 < 1,791 < 2,3838$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Autokorelasi pada model regresi.

3. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Dengan menggunakan data hasil penelitian, seperti yang digambarkan pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi sederhana yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	82.026	33.864	2.422	.019	
	Pemeriksaan_ Pajak	3.518	.951	.437	3.700	.000

a. Dependent Variable: SPT_Badan

Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada Tabel 4.8, dengan menggunakan program SPSS versi 17,0 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 82,026 + 3,518X + e$$

- Konstanta sebesar 82,026 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebesar 82,026 Atau jika tidak ada Pemeriksaan Pajak (X) maka nilai kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah sebesar 82,026.
- Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 3,518 menyatakan bahwa setiap terjadi pemeriksaan pajak sebanyak 1 (satu) kali akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Timur sebesar 3,518. Atau dengan kata lain setiap penambahan 1% tingkat pemeriksaan pajak (X) maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan meningkat sebesar 3,518%.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Untuk membuktikan apakah variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka digunakan uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai $t-sig > \alpha = 0,05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t-sig < \alpha = 0,05$, maka H_a diterima. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t-sig > \alpha = 0,05$, maka H_a ditolak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	82.026	33.864		2.422	.019
Pemeriksaan_Pajak	3.518	.951	.437	3.700	.000

a. Dependent Variable: SPT_Badan

Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Untuk membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka kita harus mencari terlebih dahulu hasil dari t_{tabel} . Untuk mencari hasil dari t_{tabel} , diperlukan rumus untuk mencari nilai dari t_{tabel} , yaitu :

$$t_{tabel} = (\alpha : 2; n-k-1)$$

dimana:

α = tingkat kepercayaan

n = jumlah data

k = jumlah variabel bebas

Sehingga diperoleh $t_{tabel} = (0,05 : 2; 60-1-1)$ kemudian didapat dari t_{tabel} hasil akhir berupa 2,00172.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak sebesar 3,700 > dari t_{tabel} sebesar 2,00172 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang mendekati satu variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.437 ^a	.191	.177	24.623

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan_Pajak

Sumber: Data Diolah (Hasil Output IBM SPSS versi 20)

Dari output model summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,191 (pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu $0,437 \times 0,437 = 0,191$). Besarnya angka koefisien determinasi (R^2) 0,191 sama dengan 19,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 19,1%. Sedangkan sisanya 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian pada pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa pemeriksaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada. Dapat dilihat pada hasil pengujian regresi dimana pemeriksaan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 19,1% atau 0,191. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 19,1%, sedangkan sisanya yaitu 80,9% merupakan pengaruh dalam variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis menggunakan SPSS, maka diperoleh pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah data pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama 5 tahun. Nilai koefisien regresi sebesar 3,518. Hal ini menerangkan bahwa setiap terjadi pemeriksaan pajak sebanyak 1 kali akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 3,518% pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Kemudian dengan melihat t_{hitung} variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 3,700 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00172. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Rahayu pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang” dan penelitian Rahma Yeni pada tahun 2013 Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak” yang menerangkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlinda Batubara pada tahun 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian Nurlinda menghasilkan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan semakin baik.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Sekitar 70% APBN Negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan pajak akan tercipta dengan melakukan interaksi yang rutin antara pihak pemungut pajak dengan pihak wajib pajak. Dengan adanya interaksi yang dibangun secara rutin, hal tersebut akan memupuk kesadaran wajib pajak tentang

pentingnya melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Timbulnya kesadaran akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sesuai dengan teori kepastian hukum. Dengan dilakukannya pemeriksaan, maka akan mampu mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan untuk melaporkan dan menghitung dengan benar segala kewajibannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis berupa uji signifikan parameter individual (uji t) dengan kriteria pengujian: H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t\text{-sig} < \alpha = 0,05$ dan sebaliknya H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$ diperoleh hasil bahwa t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak sebesar $3,700 >$ dari t_{tabel} sebesar $2,00172$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima yang berarti pemeriksaan pajak (X) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y).

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur harus lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan dan mendorong wajib pajak badan agar menjadi lebih patuh sehingga mau memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ALWASIM: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
- Azis, Ziski dkk.. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Medan: Penerbit Madenatera, 2016
- Batubara, Nurlinda. *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU Medan, 2015
- Billy, Ricky dan Inggriani Elim. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak*, Jurnal EMBA Vol. 3, 2015
- Burhanuddin. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Halu Oleo Kendari, 2017
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Ikhsan, Arfan dan Misri. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Citapustaka Media Perintis, 2012
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 1999. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999
- Jessica, Olivia dan M. Didik Ardiyanto. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal ISSN Vol. 6, 2017
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset, 2013
- Maysaroh, Siti. *Analisis Pemeriksaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU Medan, 2013
- Meilina, Eva. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKOM, 2014
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: IAI, 2016

- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT Grasindo, 2004
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013
- Priyanto, Duwi. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*, Yogyakarta: Gava Media, 2010
- Purba, Arifanda. *Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008-2011 untuk menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan yang Potensial*. Tesis Program Magister UI, 2012
- Rahayu, Dwi. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang*. Skripsi Semarang, 2010
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. *SPSS VS LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*, Jakarat: Salemba Empat, 2013
- Tiraada, Tryana A.M. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP*, Jurnal EMBA Vol. 1, 2013
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Yeni, Rahma. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak*. Skripsi Universitas Negeri Padang, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Yun Syurikal Ahda Tampubolon
2. NIM : 51143152
3. Tempt/Tgl Lahir : Pematangsiantar/25 Januari 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jalan Bhayangkara No. 381

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 124401 Berijazah tahun 2008
2. Tamatan SMP Negeri 2 Pematangsiantar Berijazah tahun 2011
3. Tamatan SMA Negeri 4 Pematangsiantar Berijazah tahun 2014
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (*on going*)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Sekretaris OSIS (2011-2012)
2. Bendahara PHBI/ROHIS (2012-2013)
3. Sekretaris PERMASSI (2016)

Lampiran 2

Data Pemeriksaan Pajak dan SPT Badan setelah diolah ke dalam Ms.Excel

Thn	Bln	Jumlah Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (%)	Thn	Bln	Jumlah Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (%)
2013	Jan	34	49.88	2015	Jul	38	28.59
	Feb	30	49.76		Agst	40	28.29
	Mar	34	49.39		Sept	37	27.05
	Apr	38	49.76		Okt	45	44.34
	Mei	39	50.12		Nov	44	43.95
	Jun	38	49.39		Des	45	43.25
	Jul	31	46.1	2016	Jan	35	34.3
	Agst	32	45.39		Feb	34	34.39
	Sept	31	45.63		Mar	37	34.01
	Okt	34	59.25		Apr	34	28.16
	Nov	33	55.95		Mei	36	28.22
	Des	36	53.92		Jun	33	27.76
2014	Jan	37	41.57		Jul	35	31.31
	Feb	36	38.96		Agst	35	31.75
	Mar	37	36.68		Sept	34	30.92
	Apr	34	41.67		Okt	34	31.17
	Mei	36	39.25		Nov	30	31.65
	Jun	36	36.89		Des	38	30.68
	Jul	38	42.08	2017	Jan	37	23.06
	Agst	38	41.67		Feb	36	22.47
	Sept	39	40.36		Mar	37	21.85
	Okt	31	37.24		Apr	36	25.5
	Nov	33	36.62		Mei	36	25.82
	Des	28	37.01		Jun	36	24.1
2015	Jan	34	35.95		Jul	30	25.71
	Feb	36	35.46		Agst	36	25.93
	Mar	38	35.41		Sept	39	26.51
	Apr	33	34.97		Okt	34	16.52
	Mei	35	35.03		Nov	32	16.54
	Jun	35	34.58		Des	31	15.71

Lampiran 3

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Max	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
	ic	Statistic	ic	ic	Statistic	Error	Statistic	ic	Error	ic	Error
Pemeriksaan_Pajak	60	17	28	45	35.47	.435	3.372	.585	.309	1.325	.608
SPT_Badan	60	142	128	270	206.78	3.504	27.142	-.559	.309	2.135	.608
Valid N (listwise)	60										

Uji Normalitas KS-Z

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99148921
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.065
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		1.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.162

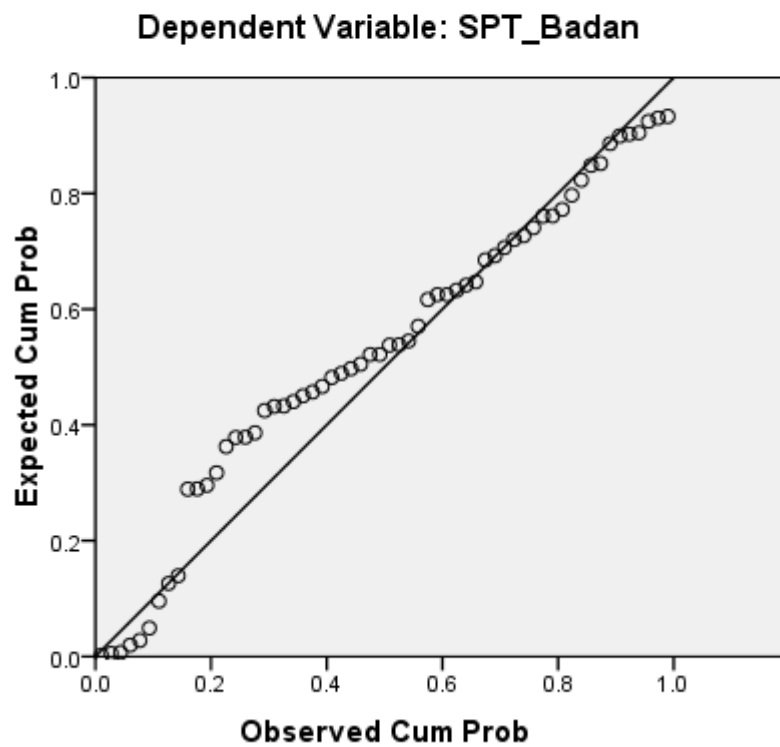
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 4

Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5

Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF

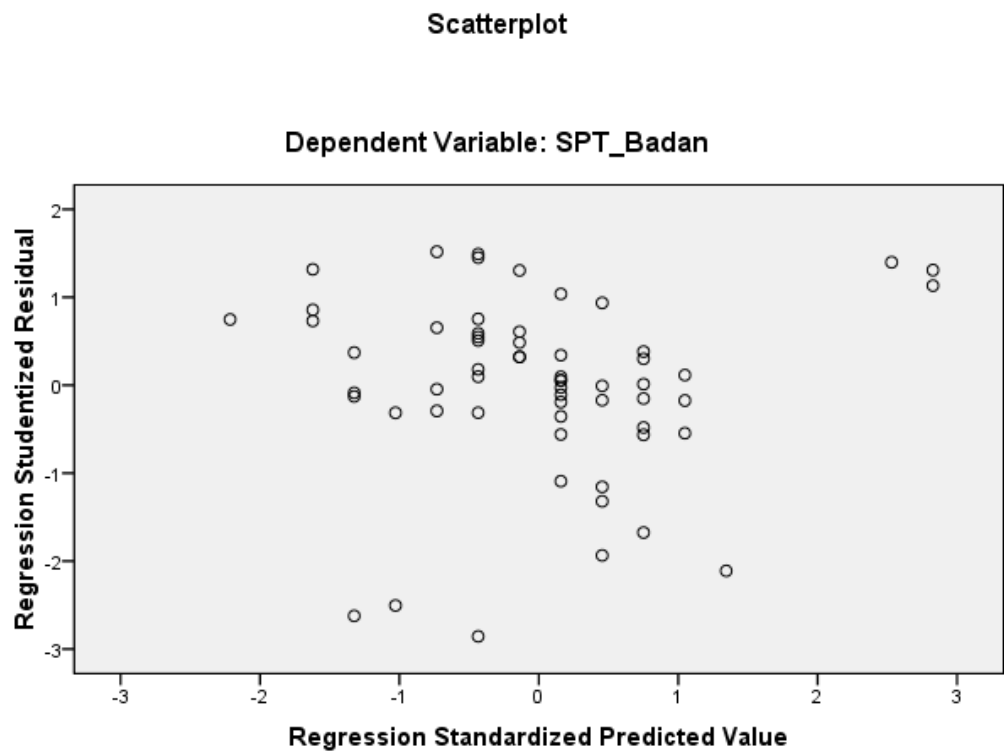
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	82.026	33.864		2.422	.019		
Pemeriksaan_Pajak	3.518	.951	.437	3.700	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: SPT_Badan

Lampiran 6

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot



Lampiran 7

Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Park

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.108	13.003		.624	.535
Ln_Pemeriksaan_Pajak	-.995	3.647	-.036	-.273	.786

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.907	.906	20.37597	1.791

a. Predictors: X1

Lampiran 8

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	82.026	33.864		2.422	.019
Pemeriksaan_Pajak	3.518	.951	.437	3.700	.000

a. Dependent Variable: SPT_Badan

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	82.026	33.864		2.422	.019
Pemeriksaan_Pajak	3.518	.951	.437	3.700	.000

a. Dependent Variable: SPT_Badan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.437 ^a	.191	.177	24.623

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan_Pajak

Lampiran 9

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran 10**Data Jumlah Pemeriksaan Pajak, SPT Badan, dan Wajib Pajak Badan****Terdaftar**

Periode	Pemeriksaan Pajak	SPT Badan	WP Badan Terdaftar	%
Jan-13	34	206	413	49.87893462
Feb-13	30	205	412	49.75728155
Mar-13	34	204	413	49.39467312
Apr-13	38	204	410	49.75609756
May-13	39	206	411	50.1216545
Jun-13	38	202	409	49.38875306
Jul-13	31	189	410	46.09756098
Aug-13	32	187	412	45.38834951
Sep-13	31	188	412	45.63106796
Oct-13	34	237	400	59.25
Nov-13	33	235	420	55.95238095
Dec-13	36	234	434	53.91705069
Jan-14	37	212	510	41.56862745
Feb-14	36	210	539	38.96103896
Mar-14	37	208	567	36.68430335
Apr-14	34	215	516	41.66666667
May-14	36	208	530	39.24528302
Jun-14	36	211	572	36.88811189
Jul-14	38	223	530	42.0754717
Aug-14	38	225	540	41.66666667
Sep-14	39	222	550	40.36363636
Oct-14	31	200	537	37.24394786
Nov-14	33	197	538	36.61710037
Dec-14	28	198	535	37.00934579
Jan-15	34	220	612	35.94771242
Feb-15	36	217	612	35.45751634
Mar-15	38	216	610	35.40983607
Apr-15	33	214	612	34.96732026
May-15	35	213	608	35.03289474
Jun-15	35	213	616	34.57792208
Jul-15	38	175	612	28.59477124
Aug-15	40	172	608	28.28947368
Sep-15	37	165	610	27.04918033
Oct-15	45	270	609	44.33497537

Nov-15	44	269	612	43.95424837
Dec-15	45	266	615	43.25203252
Jan-16	35	237	691	34.29811867
Feb-16	34	238	692	34.39306358
Mar-16	37	235	691	34.00868307
Apr-16	34	194	689	28.15674891
May-16	36	195	691	28.21997106
Jun-16	33	191	688	27.76162791
Jul-16	35	217	693	31.31313131
Aug-16	35	220	693	31.74603175
Sep-16	34	214	692	30.92485549
Oct-16	34	216	693	31.16883117
Nov-16	30	219	692	31.64739884
Dec-16	38	212	691	30.68017366
Jan-17	37	184	798	23.05764411
Feb-17	36	182	810	22.4691358
Mar-17	37	180	824	21.84466019
Apr-17	36	204	800	25.5
May-17	36	206	798	25.81453634
Jun-17	36	200	830	24.09638554
Jul-17	30	208	809	25.71075402
Aug-17	36	210	810	25.92592593
Sep-17	39	215	811	26.51048089
Oct-17	34	132	799	16.52065081
Nov-17	32	134	810	16.54320988
Dec-17	31	128	815	15.70552147